

**Proposal Hibah Skala Kecil
RIT-CEPF Wallacea Biodiversity Hotspot**

Informasi Organisasi
Nama Organisasi: KARSA INSTITUTE
Kategori Organisasi: <input type="checkbox"/> Organisasi Masyarakat (Agama/Pemuda/Parpol/Perempuan/Veteran) <input type="checkbox"/> Organisasi Basis (Kel. Tani/Nelayan/Pengelola Hutan/Masyarakat Adat/Koperasi) <input checked="" type="checkbox"/> LSM/NGO Lingkungan Hidup/Konservasi <input checked="" type="checkbox"/> LSM/NGO Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat <input type="checkbox"/> Organisasi Sosial/Kesehatan Masyarakat <input type="checkbox"/> Lembaga Advokasi/Bantuan Hukum <input type="checkbox"/> Lembaga Pendidikan/Penyuluh/Penyadaran Masyarakat <input type="checkbox"/> Organisasi Profesional/Kelompok Intelektual <input type="checkbox"/> Lembaga Penelitian/Kajian/Universitas <input type="checkbox"/> Bagian dari perusahaan yang bergerak untuk kepedulian sosial dan lingkungan (CSR) <input type="checkbox"/> Media
Nama Penanggung Jawab Organisasi: Satriyanto S Bahagia (Direktur Eksekutif)
Nama Koordinator Proyek: Rahmat Saleh (Manajer Program)
Alamat Email Organisasi: Karsa.institute@gmail.com
Alamat Organisasi : Jl. Dewi Sartika III Komplek Perum Bumi Permai Blok B 3 Kel. Petobo, 94121, PALU – SULTENG
No Telepon Organisasi : 0451 4133213
No Fax Organisasi (jika ada) : 0451 4133213
Website Organisasi (jika ada) : www.karsainstitute.or.id

<p>Jumlah Staf tetap:</p> <p>a. Laki-laki : 12 (dua belas) Orang</p> <p>b. Perempuan : 4 (empat) orang</p>
<p>Akte Pendirian Organisasi (Lampiran 1 : Copy akta): Nomor 45, Tanggal 24 Februari 2004. Notaris Hilda Rahmawati, SH</p>
<p>Sejarah, Visi dan misi Organisasi :</p> <p>Perkumpulan Karsa didirikan di Palu, Sulawesi tengah pada tanggal 24 februari 2004. Karsa di dirikan dengan maksud untuk mejadi wadah keorganisasi yang dapat dipergunakan oleh penggiatnya untuk ikut berperan dalam memprakarsai, mendorong, mendukung dan berpartisipasi dalam berbagai upaya serta inisiatif untuk memajukan pembaruan perdesaan, Pengelolaan Sumberdaya Alam yang adil dan berkelanjutan, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.</p> <p>Sejak didirikan Karsa Institute telah melakukan berbagai kegiatan Pengorganisasian, Advokasi, pemberdayaan masyarakat, study dan publikasi di berbagai wilayah perdesaan di Sulawesi Tengah serta Sulawesi Barat. Berbagai kegiatan telah menimbulkan berbagai dampak, seperti ; 1). Terjadinya perluasan akses masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Hutan terhadap tanah dan sumberdaya hutan melalui skema HKm maupun Hutan Desa, 2). Meningkatnya akses masyarakat di wilayah terpencil (dataran tinggi Pipikoro) terhadap layanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) serta Usaha Ekonomi melalui sanggar pelayanan Hak dasar berbasis masyarakat, 3). Meningkatnya kapasitas petani dalam melakukan budidaya pertanian dan perkebunan secara berkelanjutan, 4). Terselamatkannya ekosistem hutan dan asset produktif masyarakat penolakan dan pembatalan izin usaha industri ekstraktif, 5). Menguatnya kapasitas kelembagaan desa dan kelompok tani hutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan IUPHKM dan HD di wilayah Kab. Sigi, Poso dan Morowali Utara</p> <p>Beberapa kegiatan yang relevan dengan rencana kegiatan yang diusulkan adalah ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan BP DAS Palu Poso dalam memfasilitasi kegiatan perhutanan sosial dan penguatan kelembagaan Hutan desa dan HKm di wilayah kabupaten Sigi, Poso dan Morowali Utara, tahun 2015. 2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa melalui program penguatan Tata kelola Kampung (PATAKA) di kabupaten Sigi, kerjasama dengan kemitraan, 2014-2016 3. Fasilitasi skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di wilayah Kulawi dan Pipikoro, yang sebagian besar adalah Buffer Zone TN Lore Lindu dan bagian dari DAS Palu dan DAS Lariang, Tahun 2011 - sekarang 4. Mediasi penyelesaian konflik, serta pembangunan kesepakatan pengelolaan bersama TN Lore Lindu di wilayah ke Adatan Kulawi, 2015. 5. Berpartisipasi dalam program UN REDD melalui Pokja REDD +, 2011-2013 6. Berpartisipasi dalam pembentukan/restrukturisasi Forum DAS Sulawesi Tengah, melalui keanggotaan dalam Tim Formatur Pembentukan Pengurus Forum DAS 2015 – 2020.
<p>Penilaian Kelayakan</p>
<p>Dana CEPF hanya digunakan untuk jenis organisasi dan kegiatan tertentu. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.wallacea.org atau mengirimkan email ke hibah.wallacea@burung.org, atau menghubungi Rini Suryani (Grant Management Officer) di 0811 1975 836.</p>

Apakah organisasi anda berada di bawah kendali/bertanggung kepada/dibiayai oleh pemerintah?

TIDAK

Apakah aktivitas di dalam proyek ini termasuk melakukan pembelian tanah?

TIDAK

Apakah aktivitas dalam proyek ini akan melibatkan pemindahan atau perubahan atas suatu objek atau bangunan yang bernilai budaya (termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, situs, struktur, dan lanskap yang mengandung nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau nilai budayalainnya)?

TIDAK

Apakah proyek ini akan melibatkan pemindahan penduduk atau aktivitas lain yang termasuk dalam kategori pemindahan paksa?

TIDAK

Penjelasan Proyek
<p>Judul Proyek : Pembangunan Kolaborasi Untuk mendukung Pengelolaan Danau Poso yang berkelanjutan</p>
<p>Lokasi Proyek :</p> <p>a. Negara : Indonesia b. Provinsi : Sulawesi Tengah c. KBA : Danau Poso d. Kabupaten/kota : Poso e. Desa : 1). Meko dan Salukaia Kecamatan Pamona Barat 2). Sulewana Kecamatan Pamona Utara</p>
<p>Durasi Proyek : 11 (Sepuluh) Bulan</p>
<p>Arahan StrategisdariProfilEkosistemWallacea CEPF:</p> <p>[]1. Tindakan untuk mengatasi ancaman yang spesifik bagi spesies prioritas [x]2. Meningkatkan pengelolaan kawasan (KBA) yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi []3. Mendukung pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas []4. Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut [x]5. Melibatkan sektor swasta sebagai peserta aktif dalam konservasi kawasan dan koridor prioritas, di bentang alam produktif, dan di seluruh Wallacea []6. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk aksi konservasi yang efektif di Wallacea</p>
<p>Jumlah Dana yang Diusulkan: <i>(jumlah dana yang dimintakan kepada CEPF dalam USD, dengan nilai tukar Rp 13,000 /USD)</i> 237.032.000</p>
<p>Total Dana Proyek: Rp 237.032.000</p>
<p>Anggaran Proyek : (Lampiran 2 : Rincian Anggaran Biaya)</p>

Aspek Kerangka Pengaman

Jika jawaban untuk salah satu atau lebih dari pertanyaan-pertanyaan berikut adalah Ya, sebutkan dampak potensial yang akan muncul dan cara menghindar atau menguranginya. RIT dapat meminta pemohon untuk memberikan informasi tambahan dan dokumentasi proyek jika proyek tersebut memiliki potensi untuk memicu Kerangka Pengaman (*Safeguards*). Untuk informasi lebih lanjut tentang aspek Kerangka Pengaman, silakan email hibah.wallacea@burung.org atau hubungi Rini Suryani (Grant Management Officer) di 0811 1975 836

Aspek Lingkungan

Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang mungkin memiliki dampak buruk terhadap lingkungan?

Ya

Tidak

Keterangan - Berikan penjelasan mengenai dampak terhadap lingkungan dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.

Aspek Sosial

Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang cenderung memiliki dampak buruk/negatif pada masyarakat lokal?

Ya

Tidak

Keterangan - Berikan penjelasan mengenai dampak sosial dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.

Proposal

Konsep Proyek

A. Alasan proyek

Degradasi fungsi danau Poso meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun ini (2015),fenomone itu nampak dari meningkatnya interval tingkat permukaan air pada musim kemarau dengan musim penghujan. Pada bulan oktober permukaan air danau Poso surut hingga 800 meter (Kompas,10/10/15), padahal,lima bulan sebelumnya (mei 2015) permukaan air danau telah meluap hingga menggenangi 6 desa di 3 kecamatan disekitar danau. Meskipun pernah terjadi di tahun sebelumnya,skala pasang dan surut pada tahun ini, dianggap merupakan paling ekstrim.

Kerusakan pada danau disebabkan oleh : Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA), Kerusakan Lahan, Kerusakan Sempadanserta Pencemaran Perairan. Penelitian yang dilakukan PPLH UNTAD dan BAPPRDAL Poso tahun 2007,menunjukan terjadinya penurunan kualitas air danau, serta pendangkalan dengan kategori (dangkal–agak dangkal) seluas $\pm 7.072,64$ Ha atau 19,28% dari luas danau. Pendangkalan tersebut tentunya telah mempengaruhi daya tampung danau, yang pada akhirnya akan mengurangi umur danau.

Pada saat ini skala kerusakan danau tentunya semakin meningkat, terutama jika melihat perubahan penggunaan lahan di sekitar danau serta peningkatan pemanfaatan danau yang tidak diikuti dengan penerapan kaidah konservasi tanah dan air, serta pengelolaan lahan ramah lingkungan. dimasa yang akan datang kerusakan akan terus meluas, dengan dampak yang semakin merusak. Kecuali ada perubahan tindakan dalam pengelolaan ekosistem danau, yang hanya dapat dilakukan secara kolaboratif oleh para pihak yang berada diseputar danau dan menerima manfaat dari danau.

B. Adakah dampak dari pelaksanaan proyek ini bagi:

a. Jenis-jenis prioritas yang terdapat di dalam KBA

Iya. Karena peningkatan tindakan perlindungan baik melalui penetapan area perlindungan baru maupun perubahan perilaku pemanfaatan oleh para pihak akan mengurangi tekanan dan ancaman terhadap jenis maupun habitat jenis-jenis prioritas di dalam KBA danau Poso seperti ikan Buntingi Popta (*Xenopoecilus poptae*), Bungu Poso (*Weberogobius amadi*), Buntingi paruh-bebek (*Adrianichthys kruyti*) yang merupakan jenis berstatus kritis (*Critically Endangered* – CR) dalam status IUCN 2014. (ringkasan profil ekosistem wallacea, CEPF – Burung Indonesia, 2014).

b. Pengelolaan KBA yang lebih baik

Iya. Karena proyek ini berdampak pada perubahan level peran dan tanggung jawab pengelolaan KBA baik pada; (1) level aktor; dari satu pihak eksklusif menjadi multipihak yang inklusif. (2). Level programatik dimana pelestarian danau didorong **terintegrasi** dan **terinstitusionalisasi**kedalam menjadi agenda kelembagaan,sehingga ada perencanaan dan tindakan aksi yang kontinyu. Ketiga, level regulasi dimana parapihak menetapkan peraturan yang mengikatkan dirinya untuk memiliki perspektif dan tindakan sistemik berjangkapanjang dalam pengelolaan KBA.

c. Masyarakat di sekitar KBA dan stakeholder terkait lainnya

Masyarakat merupakan “korban” utama degradasi danau Poso. Baik yang timbul karena bencana, maupun karena penurunan fungsi ekonomi dan ekologis danau. Disamping itu,

kerugian juga mengancam pihak Swasta seperti PT Poso Energy dan pengelola bisnis wisata dan Pemda. Olehnya Perbaikan kondisi danau akan memberi manfaat baik masyarakat, swasta maupun Pemda.

C. Tujuan Proyek:

Membangun Pengelolaan Danau Poso yang berkelanjutan melalui kolaborasi para pihak dan integrasinya ke dalam kebijakan dan Program Desa, SKPD dan UPTP

D. Keluaran proyek

1. Adanya Kesepakatan Penataan Ruang yang mengalokasikan ruang perlindungan dan ditetapkan sebagai areal/kawasan perlindungan serta rencana kerja dan pilot kegiatan oleh pemerintah desa yang terintegrasi kedalam RTR Desa, Renstra danau Poso, RK SKPD, UPT dan swasta
2. Adanya kesepakatan kerjasam pengelolaan danau poso yang berkelanjutan antara pihak swasta (PT Poso energi) dengan desa dalam kerangka Imbal Jasa Lingkungan atau Payment Environmental System (PES)

E. Aktivitas Proyek:

Keluaran 1	<p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Rapid Assesment di desa Meko, Salukaia dan Meko. 2. Melakukan Pemetaan partisipatif bersama warga desa Meko, Salukaia dan Sulewana untuk menyepakati batas-batas DTA Desa Meko, Salukaia dan Sulewana 3. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang yang memasukan arel perlindungan Hutan dan Lahan di wilayah Desa Meko, Salukaia dan Sulewana Workshop Para Pihak Pengelolaan Danau Poso dalam kerangka kerja dan Kebijakan strategis Pemerintah Daerah
Keluaran 2	<p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan dan Pembekalan Tim representasi desa 2. Study Skema imbal jasa lingkungan di danau Poso 3. Pertemuan Tematik dengan Stakeholder Target (Desa, PT.Poso Energy, Organisasi gereja, Pemerintah Daerah) 4. Workshop Multipihak : merumuskan mekanisme IJL danau Poso untuk pengelolaan danau Poso yang berkelanjutan. 5. Publikasi dan Kampanye proses dan hasil program melalui Pemberitaan Mei

Kaitan dengan Strategi InvestasiCEPF

Capaian proyek ini akan berkontribusi pada 2 arahan strategis investasi CEPF. Yang pertama terkait dengan arahan strategis 2. Perlindungan Tapak, dan kedua, arahan strategis 5pelibatan sektor swasta dalam pelestarian keaneka ragaman hayati.

Kaitan dengan arahan strategis II

Keberhasilan proyek ini akan ditentukan oleh kemampuan pelaksana proyek dalam membangun kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan serta, kemampuan menjembatani komunikasi, dan negosiasi diantara para pemangku kepentingan (Masyarakat, Swasta dan Pemerintah Daerah) hingga dapat membuahakan kesekapatan dan kerjasama. karena keluaran pertama proyek berupa “Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan Danau Poso yang berkelanjutan antara pihak swasta (PT Poso Energi) dengan desa, dalam kerangka pengembangan mekanisme imbal jasa lingkungan atau Payment Environmental system (PES), hanya mungkin untuk dilakukan diatas kesepahaman dan komitmen untuk berbagi peran, tanggung jawab dan sumberdaya diantara para pemangku kepentingan. kerangka kerja demikian ini sejalan dengan arahan strategis II prioritas investasi butir pertama ; memfasilitasi kerjasama yang efektif antara organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal dan masyarakat adat, dan unit pengelola kawasan untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Disain proyek ini juga sejalan butir tiga arahan strategis II yaitu “Mengembangkan dan menerapkan pendekatan pengelolaan yang mengintegrasikan pemanfaatan berkelanjutan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemangku kepentingan lokal dengan konservasi nilai-nilai ekosistem di KBA di luar kawasan konservasi”. Mengingat penetapan areal perlindungan yang akan dilakukan oleh desa, merupakan perluasan dari areal yang memiliki prospek perlindungan, yang akan memiliki nilai yang sama dengan kawasan yang dikonservasi meskipun ditetapkan dengan cara dan landasan hukum yang berbeda dengan kawasan konservasi. Disamping itu kerangka kerjasama para pihak senantiasa diletakkan dalam mendukung pengelolaan SDA berkelanjutan. Termasuk dalam pengembangan insentif melalui mekanisme PES.

Keluaran proyek ini juga akan menjawab isu-isu terkait dengan arahan strategis II, yaitu ; Tidak ada kawasan lindung di Danau Poso ...dst”. dengan demikian output 1 proyek berupa penetapan kawasan perlindungan dengan memanfaatkan kewenangan desa sesuai dengan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam melakukan perencanaan dan penataan ruang, akan dapat memberi kontribusi dalam menjawab isu tersebut, dan sekaligus menjadi bagian dari pendekatan bentang lahan dalam pengelolaan SUB-SUB DAS dan DAS Poso secara keseluruhan.

Kaitan dengan arahan strategis V

Arahan strategis V “pelibatan sektor swasta dalam pelestarian keanekaragaman hayati” merupakan salah satu tujuan langsung dari proyek ini. Tujuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keberadaan PT Poso Energy sebagai salah satu perusahaan *Power Supply Plan* yang memanfaatkan sumber air danau Poso melalui Sungai Sulewana yang merupakan outlet danau Poso. Melalui PLTA Sulewana, PT.Poso Energy, diperkirakan mampu memproduksi listrik 540 MW listrik, melalui proyek PLTA Poso-1 dengan potensi 60 MW, PLTA Poso-2 180 MW, dan PLTA Poso-3 dengan kapasitas 300 MW, yang akan dipasok ke wilayah sulawesi tengah, dengan nilai investasi lebih dari 2,7 Triliyun (kantor perwakilan Bank Indonesia Sulteng, 2013) keberlangsungan investasi dan operasi PLTA sangat bergantung pada kualitas dan debit air danau Poso, sehingga PT Poso Energi menjadi salah satu pihak yang paling rentan dengan degradasi danau Poso. Disamping itu, sampai sejauh ini, PT Poso Energi juga menjadi pihak yang paling menerima manfaat ekonomi dari Danau Poso. Oleh karenanya, PT Poso Energi juga menjadi memiliki tanggung jawab secara sosial dan ekologis bagi danau poso dan masyarakat yang bermukim di Daerah Tangkapan Air, sempadan danau dan sub-sub DAS, DAS Poso yang turut berkontribusi dalam melestarikan danau Poso.

Pelibatan peran PT Poso Energi dalam pelestarian keragaman hayati dapat diwujudkan dengan cara

membantu masyarakat desa dalam upaya pemanfaatan dan penggunaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan dan pemulihan ekosistem, melalui pemberian insentif konservasi bagi desa yang telah memiliki inisiatif dan rancangan konservasi, baik dengan menggunakan sumber dana CSR maupun sumber dana lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Kerjasama ini dapat didekati dengan konsep IJL (Imbal Jasa Lingkungan), dan/atau sejenisnya, dengan bentuk dan sistem pemberian kompensasi yang akan disepakati secara bersama.

Pelibatan Swasta, selain dapat meningkatkan sumberdaya bagi inisiatif konservasi, juga dapat berdampak secara internal kepada pihak swasta, dengan meningkatnya pemahaman dan keberpihakan pada konservasi. Dengan demikian, upaya konservasi di danau Poso kedepannya menjadi suatu upaya yang inklusif, yang digagas dan diselenggarakan oleh banyak pihak secara komplementer.

Mitra Kerja dalam Proyek / Stakeholders

Nama Mitra Kerja	Peran Mitra dalam Proyek ini
Masyarakat Desa Sulewana Meko dan Salukaiya	<p>Merupakan Pelaku Utama, yang secara ditempatkan/menempatkan dirinya dalam proses-proses negosiasi dengan pihak supra desa. Termasuk didorong untuk memiliki inisiatif dalam memproduksi/reproduksi nilai, prinsip dan semangat serta kebijakan/peraturan (sesuai kewenangannya) yang akan berkontribusi dalam pelestarian ekosistem dan keragaman hayati disekitar danau Poso.</p> <p>Masyarakat desa, direpresentasikan oleh pemerintah desa, atau unsur lain dari dalam desa yang disepakati bersama, akan mejadi pelaku utama dalam proses negosiasi dengan pihak supra desa, baik swasta maupun pemerintah, dalam upaya mewujudkan kesepakatan imbal jasa lingkungan.</p>
PT Poso Energi	<p>Merupakan salah satu pengguna utama sumberdaya air danau Poso. Mitra ini akan menjadi pihak yang dinegosiasikan dalam rangka pembangunan kesepakatan imbal jasa lingkungan. PT Poso Energy diharapkan bersedia untuk mengalokasikan dana CSR atau sumber dana lainnya sebagai insentif bagi desa-desa di lingkaran danau untuk mendukung inisiatif pengelolaan danau poso berkelanjutan. Bentuk insentif dan cara pemberian insentif akan memiliki banyak pilihan, tergantung pada kesepakatan para pihak.</p> <p>Disamping itu, pihak Poso Energi akan diorong untuk ikut mengembangkan disain pelestarian danau Poso secara komprehensif dan untuk jangka panjang.</p>
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso	<p>Merupakan otoritas yang diharapkan dapat terlibat dan mendukung inisiatif pengelolaan danau Poso berkelanjutan. Dalam proses penyelenggaraan kegiatan, perwakilan pemerintah kabupaten Poso diharapkan terlibat aktif untuk mendinamisasi dan mengkatalisasi pencapaian kesekatapatan antara</p>

	<p>masyarakat dengan swasta.</p> <p>Disamping itu, Pemerintah daerah diharapkan juga dapat mengambil hikmah dari berbagai tahapan proses, sehingga terdorong untuk mereplikasi model kerjasama yang sudah dibangun kedalam skala yang lebih besar dan luas.</p> <p>Dalam jangka panjang, pemerintah daerah diharapkan juga dapat mengeluarkan kebijakan daerah untuk menjadi landasan yang lebih kokoh bagi kesepakatan pengelolaan bersama maupun pembangunan kesepakatan-kesepakatan sejenis.</p>
DRPD Kabupaten Poso	<p>Merupakan lembaga perwakilan rakyat, yang secara formil merupakan mewakili kepentingan masyarakat di wilayah dapilnya masing-masing.</p> <p>DRPD mempunyai fungsi legislasi sehingga berpotensi untuk mengangkat skema imbal jasa lingkungan ke level peraturan daerah.</p> <p>DRPD Poso juga diharapkan terlibat dalam jalannya perumusan mekanisme IJL dan negosiasi antara masyarakat dengan PT Poso energi. Selain meningkatkan bobot forum negosiasi, kehadiran DPRD juga akan</p>
Sinode GKST	<p>Merupakan aktor penting dan strategis di daerah Poso. GKST merupakan representasi moral dan spiritual bagi masyarakat di sekitar danau, yang memiliki pengaruh yang tidak kalah besar dari pengaruh kekuasaan formil.</p> <p>Pelibatan GKST akan memperbaiki kualitas representasi dan legitimasi proses. Tokoh-tokoh pada berbagai tingkatan akan dilibatkan dalam setiap fase kegiatan, mulai dari penyiapan didesa, perumusan skema kerjasama sampai dengan negosiasi dan pengawalan hasil negosiasi.</p>
Universitas Kristen Tentena	<p>Kalangan akademisi akan berperan dalam merformulasikan berbagai konsep, dan argumentasi akademis yang dibutuhkan sebagai kerangka logis dan landasan pemikiran perlunya kesepakatan danau.</p> <p>Akademisi akan dilibatkan dalam melakukan riset, kalkulasi dan penulisan naskah akademis sebagai bahan dalam proses negoasiasi antara para pemangku kepentingan.</p>

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Konsep Gender mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki

yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan. Peran gender meliputi Peran Produktif, Peran Reproduksi, Peran Sosial. Disadari sepenuhnya, di wilayah perdesaan biasanya terdapat ketimpangan dalam relasi gender. Secara kultur relasi perempuan laki-laki cenderung dipengaruhi budaya patriarki.

Karenanya proyek ini akan menggunakan pendekatan gender afirmatif dalam setiap tahapan kegiatannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Gender afirmatif memberikan kewajiban bagi pelaksana program dan para pihak lainnya untuk senantiasa melibatkan perempuan dan memiliki perspektif gender. Sehingga bisa menjamin akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan Pengambilan manfaat oleh perempuan dari berbagai kebijakan maupun program .

Pelaksanaan proyek ini juga didisain untuk peka terhadap terhadap pelapisan sosial Didalam masyarakat termasuk, kemungkinan terjadinya eksklusi dari sekelompok masyarakat kepada seseorang atau sekelompok orang baik yang disebabkan adanya perbedaan baik agama, etnis, kondisi fisik, pilihan orientasi seksual dan sebagainya.

Suatu tahapan kegiatan, yaitu analisis sosial akan dilaksanakan diawal program untuk memahai struktur dan relasi sosial di dalam desa, termasuk gender. Hasil study akan dipergunakan untuk memahami konfigurasi sosial, politik dan ekonomi di dalam desa sebagai basis bagi penyusunan pendekatan lapangan. namun terlepas dari itu, pelaksanaan proyek akan memastikan agar setiap pihak didalam desa dapat terlibat dalam berbagai tahapan kegiatan di dalam desa, dengan memberikan keutamaan terhadap kelompok marginal.

Keberlanjutan Jangka panjang

Keberlanjutan jangka panjang program ditentukan oleh kemampuan dalam memperkuat dan memperdalam keterlibatan institusi di level desam serta dukungan para pihak melalui mekanisme kerjasama yang fungsional. Karenanya peran lembaga desa, swasta dan pemerintah merupakan pilar keberlanjutan program, yang akan didorong untuk terusberkembang dan membentuk kelembagaannya sendiri.

Hasil lain dari proyek berupa adanya area-area perlindungan yang ditetapkan dalam RTR Desa, tentunya akan menjadi tanggung jawab kelembagaan desa. Karena melekat ke dalam kelembagaan desa, maka capaian atau hasil tersebut akan memiliki jaminan berkelanjutan.

Disamping itu, keberlanjutan proyek dan terutama replikasinya, akan didekati dengan cara mendiseminasikan dan menginternalisasikan hasil-hasil proyek, berupa cerita sukses ke dalam pemerintahan daerah. Sehingga kedepan, perluasan skema-skema seperti ini akan menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Upaya dimaksud akan dilakukan melalui lobby dan diskusi dengan pemerintah kabupaten maupun DPRD dengan memanfaatkan jaringan formal maupun informal yang dimiliki lembaga pelaksana.

